

**KARYA ILMIAH**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA**

**OLEH**

**DRS. WELSON Y. ROMPAS, MSI**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
MANADO  
2010**

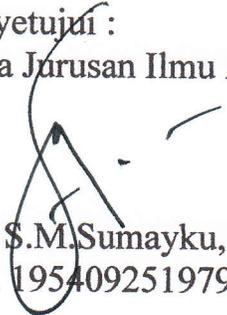
## LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

---

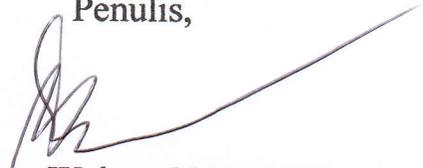
a. Nama : Drs. Welson Y. Rompas, MSi  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. NIP : 131 851 628  
d. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tkt. I, IV/b  
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
f. Jurusan : Ilmu Administrasi  
g. Program Studi : Administrasi Negara  
h. Judul Karya Ilmiah : Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa

---

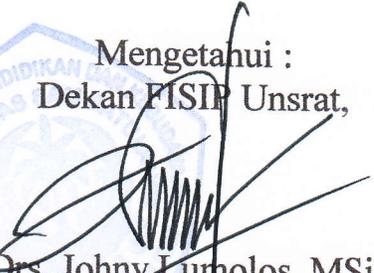
Menyetujui :  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi,

  
Drs. S.M. Sumayku, MSi.-  
NIP. 195409251979031002.-

Penulis,

  
Drs. Welson Y. Rompas, Msi.-  
NIP. 196109241989031010.-

Mengetahui :  
Dekan FISIP Unsrat,

  
Drs. Johnny Lumolos, MSi.-  
NIP. 195806051986031004.-

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan penyertaanNya maka penulisan karya ilmiah ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan.

Karya Ilmiah ini diberi judul : Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi pembangunan desa.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya.

Semoga karya ilmiah ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

*Penulis,*

*WYR*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemberdayaan.....	3
B. Konsep Memahami Pokok Pengertian Masyarakat.....	6
C. Konsep Pembangunan Desa .....	8
BAB III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA	
A. Eksisten terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat	18
B. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan Desa	24
C. Hambatan-hambatan terhadap pemberdayaan masyarakat .. Dalam Implementasi Pembangunan.....	26
BAB IV. KESIMPULAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin menuju masyarakat adil makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitan ini, pemerintahan Republik Indonesia menempatkan Kawasan Pedesaan sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam konteks Pembangunan Nasional adalah merupakan suatu kebijaksanaan nasional yang didasarkan pada beberapa alasan mendasar, antara lain **Pertama**, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pedesaan. **Kedua**, bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang hasil-hasilnya langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat banyak, sehingga keberhasilan pembangunan desa akan memberikan dampak positif sekaligus merupakan barometer keberhasilan Pembangunan Nasional. **Ketiga**, bahwa Pembangunan desa mempunyai arti dan peranan yang strategis dalam rangka Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, karena desa dan masyarakatnya merupakan landasan atau basis dan kekuatan Sosial Budaya, Ekonomi-Politik, dan Pertahanan Keamanan Nasional (Depdagri, 1999)

Namun demikian untuk melaksanakan Pembangunan desa yang lebih efektif apalagi efisien, maka pelaksanaan Pembangunan desa itu sendiri perlu mencermati secara sungguh-sungguh kondisi-kondisi objektif yang hidup dan melekat dalam kehidupan masyarakat desa yang cenderung menjadi faktor-faktor penghambat kearah percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang hendak diwujudkan sehingga penggunaan sumber-sumber yang tersedia tidak menimbulkan pemborosan yang serius atau menghindari ekonomi biaya tinggi. Kondisi-kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, antara lain adalah (1) bahwa ciri khas masyarakat desa, bahwa pada umumnya masih berpikir dan bekerja secara sederhana dan tradisional (Prasadja, 1982 ); (2) Kurangnya pendidikan, usaha-usaha mereka biasanya terdiri dari satuan-satuan kecil, lemah, terbelakang, kemiskinan, tradisional / keterikatan pada adat istiadat dan kurang cakap

dibanding dengan masyarakat dinegara-negara maju (Todaro, 1994) : (3) Karena kondisi yang demikian ini, maka masyarakat desa yang merupakan mayoritas penduduk suatu negara, menurut Sajogyo (1984) akan membawa mereka kedalam jurang kemiskinan atau kemelaratan.

Kondisi masyarakat pedesaan yang digambarkan oleh para ahli di atas, bertumpu pada dua persoalan pokok yang sangat menonjol dan mewarnai perkembangan serta pertumbuhan kawasan pedesaan di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia, yaitu : (1). Implementasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) : dan (2). Pemberdayaan kelembagaan desa maupun masyarakat agar mampu menumbuhkan prakarsa, swadaya dan inisiatif masyarakat desa itu sendiri dalam menuju proses kemandiriannya dan desa swadaya ke desa Swasembada.

Persoalan yang disebut pertama, yakni pembangunan SDM terasa sangat mendesak untuk segera ditanggulangi mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat desa termasuk kualitas SDM aparat pemerintah desa (Kepala desa, Perangkatnya dan Lembaga-lembaga di desa). Terindikasi masih relatif rendah sementara hampir semua program pembangunan sektoral dan tiap-tiap departemen dan program pembangunan regional (daerah) tertumpu di desa. Berbagai instruksi dan atas akhirnya jatuh ke tangan Pemenntah desa (kepala desa dan perangkatnya, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa.

Sebagai aparat terakhir yang diberi tanggung jawab untuk menanggulangi hampir semua program pembangunan yang muncul dari swadaya prakarsa dan inisiatif masyarakat desa itu sendiri ( Bottom - Up Program).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, memang merupakan fenomena umum di negara-negara sedang berkembang dan merupakan masalah pokok dalam usaha percepatan keberhasilan pembangunan dinegara-negara yang bersangkutan.

Indonesia sebagai negara yang tergolong sedang berkembang juga memiliki permasalahan yang sama dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Hal ini sesuai dengan laporan yang dikemukakan oleh UNDP tahun 1996, dimana Indonesia menduduki urutan ke - 102 (dilihat dari ukuran Human Development Index atau HDI) diantara negara-negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negaranegara lain di Asia seperti ; Jepang yang menduduki urutan ke- 3, Hongkong urutan ke - 22 dan Korea

Selatan urutan ke - 29, maka Indonesia masih sangat ketinggalan dalam kualitas sumber daya manusianya (Harian Kompas 28 April 1997)

Adapun persoalan yang disebutkan terakhir, dipandang penting karena hanya dengan meningkatkan kemampuan prakarsa swadaya dan inisiatif (kualitas partisipasi), baik bagi para aparat pemerintahan desa, lembaga - lembaga masyarakat di desa, maupun masyarakat desa. Pada umumnya, diharapkan mereka mampu menanggulangi persoalan-persoalan yang timbul didalam desanya masing-masing seperti : (1) Mengatasi kekurangan pangan dan gizi ; (2) Mengatasi lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih ; (3) Mengatasi pengangguran ; (4) Mengatasi ketimpangan struktur masyarakat dan aparatur dan lembaga-lembaga desa, seperti LMD ,BPD yang kurang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagaimana mestinya ; (5) Memantapkan koordinasi pelayanan pemerintah desa, baik terhadap unsur aparatur vertikal (Kecamatan dan daerah), maupun pelayanan terhadap tuntutan dan kepentingan masyarakat desa itu sendiri (Pelayanan Horisontal).

Sejalan dengan penmasalahan-permasalahan diatas, GBHN (1998) mengamanatkan bahwa pembangunan desa dan masyarakat pedesaan harus terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan membuka iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada.

Arahan GBHN di atas menginsyaratkan bahwa hingga dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa disinyalir masih relatif rendah sehingga mempengaruhi derajat pendapatan pembangunan non desa, dan kondisi ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh rendahnya kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintah dan pembangunan desa, yakni pemerintah dan perangkat desa serta lembaga-lembaga di desa di satu sisi dan di sisi lain, masih relatif rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.

Gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang di kemukakan di atas, setidaknya berlaku di daerah pedesaan. Indikasi menunjukkan bahwa pemberdayaan



## BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis kata pemberdayaan berasal dari suku kata "daya" yang berarti kekuatan, kemampuan. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta 1982 : 126. Pemberdayaan diartikan kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dari semua jenis pekerjaan yang dilakukan baik privat dan publik, serta menolak upaya apapun yang menilai rendah pekerjaan dalam mempertahankan hidup (Sunyoto Usman dalam Pemberdayaan Masyarakat hal. 15)

Pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan masyarakat (Empowerman Of Society) berupa upaya mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri manusia yang memungkinkan untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap berbagai sumber daya dan dana (Colletta dalam Sistem Kesejahteraan hal. 53)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha keterlibatan diri anggota masyarakat yang didorong oleh faktor yang ada dalam dirinya berupa keyakinan, kesadaran akan bekal pengetahuan dalam hidupnya, keberanian mengutarakan pendapat, pemahaman bahwa perubahan membutuhkan waktu (Paul Yohnson 1994: 169).

Dikemukakan Sunyoto Usman macam perspektif yang relevan dipakai pendekatan permasalahan pemberdayaan masyarakat. Pertama (1) yaitu konsep perspektif yang mengfokus pada alokasi sumberdaya (Resource Allocation). Kedua (2), yang mengfokus pada penampilan kelembagaan (Institutional Performance). Lebih lanjut dikatakan, pemberdayaan masyarakat lebih terkait dengan pendekatan bottom up (bawah ke atas) ketimbang pendekatan dari atas ke bawah (Top Down).

Sumarjodiningrat (1999) mengemukakan pemberdayaan masyarakat meliputi kemampuan sumber-sumber intelektual individu maupun anggota kelompok masyarakat, kelembagaan, pranata desa, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti : kerja keras, hemat, bertanggung jawab dan mengintegrasikannya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.

Dikatakan oleh Sajogyo (1996 : 281) Pemberdayaan Masyarakat adalah mengoptimalkan fungsi kelembagaan pedesaan. Oleh karena pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkaikan nilai-nilai sosial, konsep ini mencenninkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "People Central Partisipatory, Empoklermen and Sustanable" (Chamber, 1995)

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah kemampuan masyarakat berupa upaya mengembangkan dan mematangkan, memobilisier berbagai potensi yang memungkinkan masyarakat desa hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara.

## **B. Memahami Pokok Pengertian Masyarakat**

Hasan Shadily, (1980 : 85) mengatakan "Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri alas beberapa manusia yang satu sama lainnya memiliki hubungan secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain". Masyarakat menunjuk pads warga atau anggota pergaulan sebuah desa atau kota tertentu atau suku suku suatu bagsa. Berarti masyarakat ialah kelompok sosial yang memenuhi kriterianya yaitu pergaulan hidup dimana mereka mengadakan interaksi - interaksi dan komunikasi sosial. bengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa masyarakat ialah wadah dan wilayah kehidupan kelompok yang ditandai dengan batas-batas tempat tinggal dan perasaan sosial yang tumbuh didalamnya yang menumbuhkan nilai-nilai, norma-norma yang ditentukan oleh kehidupan pergaulan masyarakat itu. Masyarakat merupakan sekelompok manusia dalam suatu kebersamaan hidup dan dengan wawasan hidup yang bersifat kolektif, yang menunjukkan keteraturan tingkah laku warganya guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masingmasing,

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas peranan - peranan dan kelompok - kelompok yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yang mana tindakan - tindakan dan tingkah laku sosial diwujudkan.

George Simmel, (1908 : 249 – 250) juga mengungkapkan beberapa kriteria tentang masyarakat sebagai suatu proses interaksi, yaitu :

- a. Masyarakat terdiri dari jaringan jaringan relasi-relasi antara orang, yang menjadikan mereka bersatu. Masyarakat bukan badan fisik, juga bukan bayangan saja di dalam kepala orang, melainkan sejumlah pola perilaku yang disepakati dan ditunjang bersama itu satu - satunya titik tolak agar kita mencapai suatu pengertian akan masyarakat yang sebenarnya.
- b. Relasi - relasi aktif antara orang yang berkelompok atau bermasyarakat, tidak semua sama sifatnya. Relasi-relasi itu dapat mengarah kepada terbentuknya komunitas (*gemeinschaft*, paguyuban) atau kepada *association*.
- c. Kesatuan - kesatuan sosial tidak hanya terbentuk dari relasi - relasi integrative dan harmonis. Demi tercapainya suatu strukturisasi sosial yang sehat, maka (*gesellschaft*, patembayan) kritik, oposisi, persaingan sikap iri hati sama diperlukan seperti kesesuaian paham, partisipasi dan persahabatan. Keadaan masyarakat ditentukan oleh dua jenis interaksi, yang kedua-duanya mempunyai efek positif.
- d. Tidak semua kesatuan mempunyai lama waktu dan intensitas yang sama. Mereka bervariasi antara kesatuan yang ikut serta dalam pawai untuk beberapa jam saja dengan orang yang berkeluarga untuk semua hidup, antara kesatuan tamu di hotel dengan serikat pertukangan diabad pertengahan. Demikian juga tingkat atau besarnya permasyarakatan yang dicapai tidak selalu membentuk tiap - tiap kelompok. Ada kelompok yang mempunyai frekwensi interaksi dan interaksi yang tinggi, tetapi ada jugs yang mempunyai hal yang mempertemukan orang dalam suatu relasi - relasi timbal balik, semakin cepatlah juga relasi - relasi itu dilembagakan (menjadi paranata).

Pada hakekatnya kehidupan sosial itu terdiri dari sejumlah aksi - aksi reaksi yang terbilang banyaknya, baik antara perorangan maupun antara kelompok. Pihak - pihak yang terlibat menyesuaikan diri dengan salah satu pola perilaku yang kolektif. Kesatuan yang berasal dari penyesuaian diri itu, kita sebut kelompok atau masyarakat. Misalnya negara akan merupakan suatu kesatuan objektif kalau pada warganya dijalankan satu dengan yang lain oleh pengakuan, ikatan dan perasaan yang

sama juga. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu proses dinamis yang ditentukan oleh apa yang dilakukan anggotanya, suatu kejadian yang berlangsung terus selama mereka masih bersedia untuk memberi dukungan aktif kepada itu. Seandainya suatu masyarakat membubarkan semua struktur sosialnya dan tiap - tiap anggota mulai memakai isyaratnya sendiri mencari jalannya sendiri, membuat peraturannya sendiri sehingga pada akhirnya tidak tinggal bersama.

Spencer (K. J. Veeger, 1990 : 39) mengemukakan pendapatnya bahwa "Masyarakat adalah organisme yang berdiri sendiri dan berevolusi sendiri lepas dan kemauan dan tanggung jawab anggotanya dan dibawah kuasa suatu hukum dalam bukunya "social statics", masyarakat dinamakan dengan suatu organisme".

Pandangan tentang masyarakat dikemukakan oleh Soekanto (Santoso, 1992 : 90) "Masyarakat atau "Community" dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, istilah mana menunjukkan pada wajah - wajah sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok baik kelompok besar maupun kelompok kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan - kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat. Sebagai suatu perumpamaan maka kebutuhan - kebutuhan seseorang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama rekan lainnya yang sesuku. Dalam pada itu kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya sosial relationship antara anggota - anggota suatu kelompok. Dengan demikian dapat di katakan bahwa masyarakat setempat adalah merupakan suatu bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis), dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi unsurnya adalah interaksi yang lebih besar diantara anggota - anggotanya dibandingkan dengan interaksi mereka dengan penduduk diluar batas wilayahnya"

Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar - dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat tersebut.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya suatu community, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya suatu interaksi yang lebih besar diantara anggota-anggota yang bertempat tinggal disuatu daerah dengan batas-batas tertentu.
- b. Adanya norma sosial manusia di dalam masyarakat, diantaranya kebudayaan masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, norma kemasyarakatan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat.

### **C. Konsep Pembangunan Desa.**

#### **1. Pengertian.**

Pada umumnya istilah Pembangunan Desa yang di kenal adalah Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam bahasa Asing istilah Pembangunan Masyarakat Desa telah dikenal dengan Community Development.

Di Indonesia karena sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pedesaan, lebih 70 % dari seluruh penduduk Indonesia maka yang menjadi penting disini adalah desanya. Karena itu pembangunan masyarakat dijadikan pembangunan masyarakat desa. (Drs. Soleman Jusuf dan Slamet S. 1981). Demikian pula seperti apa oleh Mr. Sutomo.S. Honggowongso (1981 :71) bahwa istilah pembangunan masyarakat desa mula-mula hanya dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat saja, sesuai dengan istilah asingnya Community Development.

Dalam perkembangan selanjutnya, di Indonesia istilah pembangunan masyarakat desa lebih dikenal dengan pembangunan desa karena dalam istilah desa sudah tercakup pengertian masyarakatnya. Jadi berarti istilah apapun yang dipakai, apakah pembangunan masyarakat desa, pembangunan desa, apabila dikaji latar belakang masing-masing istilah itu sebenarnya mengandung Pengertian yang sama .

Pembangunan desa bukanlah semata-mata bentuk usaha pembangunan fisik saja tetapi pada hakekatnya merupakan sikap dan sistim kerja baru untuk membina suatu masyarakat. Pembangunan desa pada eksistensinya merupakan keseluruhan

yang merupakan suatu revolusi desa secara keseluruhan yang didalamnya berlangsung dengan cepat dan teratur dan berencana.

Pembangunan desa dalam pengertian yang luas adalah merupakan terjemahan dari "Rural Development" yang berarti kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjuk pada pengertian desa di Indonesia, yang merupakan suatu pengertian yang sangat utuh, yang menggambarkan desa dan masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Surjadi (1983 : 61) memberikan batasan tentang pembangunan desa yang di sadur dari T.R. Batten dalam bukunya *Communities and Their Development* sebagai berikut :

“Pembangunan desa adalah proses dimana masyarakat mengadaptasi dirinya kepada perubahan dan badan yang bergerak di bidang pembangunan desa itu adalah organisasi luar yang mencoba menolong proses itu dan mempercepatnya. (T.R. Batten, 1981 : 61)

Dari uraian tersebut diatas ternyata badan yang erak di bidang pembangunan dan atau petugas mbangunan memiliki tugas utama, untuk menolong asyarakat mempercepat proses perubahan yang terjadi imasyarakat. Perubahan disini adalah perubahan menuju kebaikan dengan kata lain adalah pembangunan.

Sedangkan Departemen Dalam Negeri (1975 : 1) merumuskan bahwa : pembangunan desa adalah suatu metode untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum,relatif, merata dan meningkat,yang dalam prosesnya masyarakat setempat berkedudukan sebagai subyek pembangunan dan pemerintahan memeberikan pengarahannya, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan pengairahannya.

Dari uraian diatas kita lihat bahwa ini merupakan suatu sikap atau cara dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pembangunan Desa adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang strategis serta mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena pembangunan desa harus menyentuh segenap lapisan masyarakat yang menyebar luas ke seluruh pedesaan di tanah air kita ini (Anonimus 1985 : 75).

Disamping itu pembangunan desa pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu serta merupakan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan yang meliputi segala aspek kehidupan an penghidupan masyarakat.

Dengan mendasarkan bahwa pembangunan desa merupakan juga suatu gerakan dan bahwa taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga partisipasinya dalam pnbangunan dirasakan suatu kewajiban.

Menurut Arthur Dunham (1987 : 77) dalam Community Development memberikan satu rumusan, pembangunan desa adalah sebagai usaha yang terorganisasikan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, kemampuan intergasi, dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

Disamping itu Arthur Dunham juga membagi 4 unsur dasa community development yaitu :

1. Program Berencana.
2. Pembangkitan tekad masyarakat untuk menolong diri sendiri dan tidak selalu tergantung pada pihak lain.
3. Bantuan teknis (dan pihak lain) termasuk personil, peralatan dan dana.
4. Pemaduan berbagai keahlian untuk membantu masyarakat.

Sedangkan menurut Oemar Said (1982:4) mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan dan pengorganisasian masyarakat serta pelaksanaannya diorientasikan sepenuhnya pada inisiatif dan kreatif masyarakat. Sedangkan pembangunan desa lebih luas pengertiannya, di dalamnya sudah termasuk pengertian pembangunan masyarakat desa dimana diintegrasikan semua usaha-usaha pemerintah dan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang mencakup berbagai aspek.

Sebagaimana apa yang dikemukakan diatas dapat digaris bawahi bahwa pembangunan desa serta mengadakan pengorganisasian terhadap masyarakat dalam menghadapi pembangunan.

Ndraha (1981 : 76) mengutip beberapa program Pelita III di bidang pembangunan desa sektor Departemen Dalam Negeri yang diharapkan dapat berfungsi yaitu :

1. Program Pengembangan Desa
2. Program Pembangunan Desa Terpadu
3. Program Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Gotong
4. Program bimbingan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi desa
5. Program bimbingan dan pengembangan lembaga keuangan desa.
6. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di desa dan terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan lembaga-lembaga non departemen dengan aparatnya di daerah sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing.

Dalam realisasi fisiknya pembangunan desa justru bersifat menyeluruh, menyebar luas ke seluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali semua potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat, berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan esensial masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan di desa-desa dirasakan demikian luas dan kompleksnya, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, harus tetap terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. Dan pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun masyarakat, dari pusat sampai ke daerah dan desa-desa.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai proses, sebagai metode, sebagai program maupun sebagai gerakan .

## 2. Unsur-Unsur Penbagunan Desa.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapatlah dikatakan bahwa pembangunan desa tidak lain adalah pembangunan yang dilaksanakan didesa atau kelurahan atau usaha-usaha dari masyarakat desa itu sendiri,yang di integrasikan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pernyataan diatas serta definisi-definisi tentang pembangunan desa yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan bahwa yang menjadi unsur pembangunan desa adalah :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya inisiatif sendiri dari masyarakat
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya.
4. Adanya bantuan teknis dan service dari pemerintah.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pokok yang menunjang pelaksanaan pembangunan desa adalah peranan masyarakat dan pemerintah yang dalam proses mekanismenya mengutamakan prinsip imbangan kewajiban dari kedua unsur pokok tersebut dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan penegasan pemerintah tentang pembangunan Desa sebagai berikut : Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbangan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dengan Masyarakat desa. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan ,sedangkan selebihnya dipercayakan pada kemampuan masyarakat sendiri.

Hal yang hampir serupa juga terdapat dalam Penuntun Umum Pola Pembangunan Desa, yaitu "pemerintah memegang peranan dalam hal memberikan pengarahan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan penggairahan dan masyarakat sebagai subyek pembangunan".

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pembangunan desa terjadi interaksi sosial antara pemerintah disatu pihak dan masyarakat desa dilain pihak, sekalipun nampak bahwa peranan pemerintah lebih besar. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sekarang

bagaimanapun pola pembangunan suatu negara masih sangat tergantung kepada peranan pemerintah. Dengan kata lain betapapun besarnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, namun peranan pemerintah masih lebih besar dan penting.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Joedono dalam Tjokroamidjojo (1981 :19), bahwa negara-negara baru berkembang pemerintah hanya merupakan wadah dalam masyarakat, dalam mana terhimpun sebagian terbesar dari unsur-unsur modern dalam masyarakat, menggunakan alat-alat negara sebagai alat utama didalam mengelola atau mengadministrasikan usaha-usaha pembangunan.

Bagi suatu negara yang sedang berkembang, peranan Pemerintah dalam pembangunan masih bersifat dominan, karena beberapa alasan sebagai berikut ;

Bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk alokasi dana dan daya yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Bahwa pemerintah mempunyai informasi yang paling lengkap tentang seluruh kehidupan bangsa, sedangkan informasi yang dimiliki oleh berbagai kelompok dalam masyarakat biasanya tidak lengkap dan pada umumnya bersifat parsial.

Adanya legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan beserta prioritasnya sudah barang tentu dilandasi oleh aspirasi, keinginan dan harapan yang timbul dan bersumber dari rakyat.

Bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, daya tarik untuk menjadi pegawai negeri sangat kuat di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan tidak sedikit putera putri terbaik menjadi pegawai negeri.

Bahwa kredibilitas pemerintah dalam hubungan dengan pihak donor merupakan persyaratan mutlak dalam menghadapi kenyataan bahwa negara-negara sedang berkembang memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut. (Siagian, 1984 :32).

Uraian-uraian diatas setidaknya-tidaknya memberikan satu gambaran bahwa bagi negara-negara sedang berkembang dibutuhkan peranan pemerintah yang lebih besar dalam proses pembangunan, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan kebijaksanaan, startegi, program dan perencanaan proyek penyelenggaraan pambangunan.

Siagian (1994), menyatakan bahwa peranan pemerintah yang penting dan dominan itu terlihat dalam lima wujud utama, sebagai berikut :

1. Peranan selaku modernisator
2. Peranan selaku katalisator
3. Peranan selaku dinamisator
4. Peranan selaku stabilisator
5. Peranan selaku pelopor

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan desa, maka peranan pemerintah yang efektif ialah memberikan bimbingan dan pengaruh kepada masyarakat desa dalam hal keterlibatannya dalam pembangunan desa. Bimbingan dan pengarahan serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak lain mengandung maksud untuk mendorong, merangsang prakarsa masyarakat desa sehingga mereka berpartisipasi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pembangunan desanya. Prakarsa yang demikian itu disebut prakarsa Top Down, yaitu prakarsa yang datang dari pemerintah. prakarsa yang demikian itu sangat penting artinya dalam menunjang intensitas keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah dengan berbagai cara melakukan prakarsanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

**Pertama**, dalam melakukan prakarsanya pemerintah berusaha memberikan pendidikan, latihan, bantuan penerangan penyuluhan kepada masyarakat desa. Dan usaha-usaha seperti dilakukan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan seperti kursus-kursus/latihan kerja, latihan ketrampilan, pemutaran film pembangunan, penyuluhan pertanian, penyuluhan KB, industri kecil dan lain sebagainya.

**Kedua**; disamping melalui pendidikan, maka pemerintah berusaha memberikan motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Pemerintah memberikan stimulasi dan motivasi ini biasanya dilakukan dengan cara-cara seperti pemberian dana Inpres Desa, lomba PKK, dan berbagai kegiatan lainnya yang ada didesa

**Ketiga**; disamping kedua hal yang telah dikemukakan di atas maka dalam usaha menumbuhkan partisipasi masyarakat pemerintah berusaha menyesuaikan program-

program pembangunan dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan.

Menurut PBB (1958) dalam laporan Panitia Administrasi Koordinasi PBB kepada ECOSOC, bahwa Pembangunan Desa adalah suatu proses, dengan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dari masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa, dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan secara penuh kepada kemajuan Nasional.

Selanjutnya dalam Pola Dasar Gerakan Operasional Pembangunan Desa (SK Menteri Dalam Negara No. 15/1960) ditegaskan bahwa Pembangunan Desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat terendah yang harus dibina terus menerus, sistematis dan terarah, sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha menyeluruh.

Pembangunan desa diarahkan sebagai proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan membahas dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi keinginan mereka.

Pembangunan desa tidak lain adalah seluruh kegiatan pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa secara terencana dan terkendali yang ditujukan untuk mencapai atau meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dalam segala aspek kehidupan.

Unsur-unsur pokok dari pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan masyarakat desa secara terencana dan terpadu,
2. Pembangunan desa merupakan tindakan kolektif dari pemerintah dan masyarakat desa.
3. Pembangunan desa merupakan usaha yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, atau untuk meningkatkan taraf hidup (kondisi, sosial ekonomi dan kebudayaan) masyarakat desa.

Pada dasarnya Pembangunan desa yang dilaksanakan dewasa ini telah mencerminkan beberapa hal pokok, yang antara lain :

1. Pembangunan desa menghendaki imbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat.
2. Pembangunan desa berdasarkan azas swadaya masyarakat.
3. Pembangunan desa berdasarkan azas gotong royong/kekeluargaan, jiwa musyawarah dan mufakat.
4. Pembangunan desa berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
5. Pembangunan desa dilaksanakan secara integral dengan pembangunan Nasional.
6. Pembangunan desa diselenggarakan dalam rangka pembangunan tata desa yang teratur dan serasi.
7. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pemamfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
8. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pengembangan jiwa koperatif warga masyarakat desa dan lain-lain.

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pokok-pokok kebijaksanaan tersebut, tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata akan tetapi perlu di dukung oleh partisipasi dari seluruh warga masyarakat.

Tujuan dari pembangunan desa adalah ingin memampukan masyarakat desa dalam mempengaruhi atau membangun diri mereka sendiri serta berpartisipasi membangun diri sendiri dan lingkungan.

Agar masyarakat dapat mempengaruhi masa depannya, maka pembangunan desa harus diarahkan pada :

- 1). Menciptakan suatu kondisi agar masyarakat mempunyai kapasitas melaksanakan perubahan,
- 2). Pembangunan hendaknya dapat mengusahakan suatu keadilan/pemerataan pada semua lapisan masyarakat.
- 3). Pembangunan hendaknya memberikan kuasa dan wewenang tertentu kepada masyarakat.
- 4). Pembangunan hendaknya mengusahakan adanya saling ketergantungan diantara mereka agar dapat menjamin kelangsungan masa depan mereka. (Bryant dan White, Dalam Goni, 1988).

**BAB . III**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM**  
**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA**

---

**A. Eksistensi terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.**

Dalam menggerakkan potensi masyarakat bagi terlaksananya program-program pembangunan sekarang ini, terdapat banyak aparatur pemerintah baik horisontal maupun vertikal yang ikut serta mengerahkan masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan.

Dengan demikian usaha koordinasi dari semua instansi itu perlu dimantapkan sehingga tercipta suatu kerja sama dalam hal menggerakkan/memobilisasi seluruh potensi yang ada pada masyarakat untuk mana masyarakat dapat memberi diri, mengambil bagian (melibatkan) terhadap pembangunan itu sendiri.

Dalam Ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 mengatnanahkan : Bahwa

"Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Pembinaan, penyempurnaan penertiban aparatur pemerintah, dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi alat efisien, efektif bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas - tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa usaha memperkuat pemerintah desa agar makin mampu menggerakkan (optimalisasi) potensi masyarakat untuk melibatkan dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Selain itu pula pemerintah perlu meningkatkan hubungan fungsional yang makin mantap dengan lembaga - lembaga yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya pula, seorang aparat pemerintah harus banyak berorientasi pada kebutuhan - kebutuhan masyarakat menyangkut bidang pembangunan. Menurut S. P. Siagian (1980 : 36) mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai bawahan.

Sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung pada cara - cara memimpin yang dipraktekkan oleh orang - orang atasan itu. Sebaliknya sukses tidaknya seorang pemimpin ditentukan oleh tingkat ketrampilan teknis (Technical skills) yang dimilikinya. Akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh keahliannya untuk menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik (Managerial skills)

Jadi sehubungan dengan keberadaan seorang pemimpin, maka sebagai aparat pemerintah dikatakan sebagai pemimpin yang baik, apabila dalam melaksanakan fungsi tidak mengambil dan melaksanakan keputusan sendiri tetapi didasarkan kepada keinginan, kehendak masyarakat banyak dengan dasar musyawarah/mufakat. Suatu ketentuan pemerintah yang dituangkan kepada masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan sebaik - baiknya oleh anggota masyarakat, apabila seorang pemimpin/pemerintah memiliki sifat - sifat kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Karjadi (1981 : 50) antara lain :

1. Memiliki kekuatan jasmaniah yang cukup.
2. Kekuatan rohani yang cukup.
3. Ramah tamah dan penuh perasaan.
4. Kejujuran.
5. Memiliki kecakapan tennis.
6. Cerdas.
7. Adil, ulet, dan tahan uji.
8. Suka melindungi.
9. Penuh inisiatif, bertanggung jawab.
10. Mudah menentukan keputusan.

Kartini. K. (1983 : 39) dikemukakan bahwa : Kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila yaitu kepemimpinan yang memiliki wibawa dan daya mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam buku tersebut, dicantumkan beberapa prinsip kepemimpinan seperti prinsip utama kepemimpinan Pancasila yaitu

1. Ing Ngarso Sung Tulodo
2. Ing Madya Mangun Karso.

### 3. Tut Wuri Handayani

Dengan prinsip sifat kepemimpinan seperti itu diharapkan proses kemajuan masyarakat, dapat berjalan dengan baik, lancar dan manusia. Apabila seseorang aparat pemerintah sudah dapat menjiwai prinsip, sifat kepemimpinan seperti diatas, maka peranan didalam memimpin masyarakat dapat berhasil dengan baik.

Pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam masyarakat, cara yang terbaik bukan dipaksakan kepada masyarakat tetapi sebagai aparat pememntah hendaknya mengajak, mempersuasif masyarakat untuk ikut serta dalam melibatkan diri dalam pembangunan.

Karena pemberdayaan/pelibatan masyarakat berdasarkan suatu keputusan bersama atau mereka sendiri sebagai anggota masyarakat. Jadi disini peranan pemerintah adalah bukanlah memberikan perintah tetapi memotivasi, menggerakkan atau memobilisasi keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Contoh : Keputusan anggota masyarakat untuk menjadi Akseptor Keluarga Berencana. Tidak hanya berdasarkan perintah dari pemerintah melainkan juga atas suatu keyakinan yang mendalam dari anggota masyarakat tersebut. Keterlibatannya sangat bermanfaat bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan kemudian masyarakat dan negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan suatu proses persuasi dan penerangan yang intensif dan memakan waktu yang cukup lama.

Demikian suatu idea pembangunan masyarakat desa, harus datang dari dua arah yaitu : dari organisasi pemerintah dan dari anggota masyarakat, yang ditunjang oleh sarana materi maupun mental dari pihak anggota masyarakat maupun pemerintah.

Sehubungan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat maka aparat pemerintah Desa telah banyak memberikan peranannya diberbagai kehidupan masyarakat dalam rangka memotivasi, menggerakkan, memobilisasi serta memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sendiri.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan swadaya dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa dapat dikemukakan sebagai berikut :

## 1. Bidang Sosial Ekonomi.

Dimanapun didunia ini, mengenai bidang perekonomian sangat mempengaruhi dan menentukan soal kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Didalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa setiap tahap pembangunan, maka masalah perekonomian ditempatkan dalam urutan pertama. Pembangunan ekonomi didahulukan, karena pembangunan ekonomi merupakan langkah pokok yang harus diambil untuk mendekati kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial yang menjadi cita - cita nasional.

Dalam buku Faisal Basri (1995 : 101) pembangunan ekonomi mengutamakan bidang pertanian yang merupakan lapangan kerja dari sebagian masyarakat Indonesia, dengan hasil dibidang pertanian dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan dibidang yang lain seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, pertahanan dan lain sebagainya. Selanjutnya dikemukakan, bahwa harus disadari seluruh Bangsa Indonesia bahwa ketahanan ekonomi dewasa ini merupakan titik terlemah maka pembinaan ketahanan ekonomi mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan hidup rakyat dengan tidak mengabaikan pembinaan didalam bidang - bidang lain.

Sehubungan dengan uraian diatas ini, Philip H. Combs (1980 : 228) antara lain mengatakan ; "Pembangunan sekarang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak khususnya petani yang ada di pedesaan perlu diperhatikan ketrampilan sampingan, diluar bidang pertanian".

Pada hakekatnya menjadi sasaran pembangunan disektor pertanian adalah masyarakat pedesaan yang pada umumnya, merupakan masyarakat tradisional. Untuk memperbaiki masyarakat tradisional ini harus perlu mengetahui berbagai aspek kehidupannya. Menurut bentuknya kehidupan masyarakat dapat dibagi dalam 2 (dua) aspek yaitu : aspek Sosial dan Ekonomi. Didalam perkembangannya kedua aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga aspek sosial tidak menghambat pertumbuhan pertumbuhan ekonomi.

Demikian juga pemerintah setempat setelah menerima penyuluhan dibidang pertanian, langsung menggalakkan, mengajak masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan

a. Lahan pertanian secara efisien dan efektif, usahanya antara lain menggunakan tanaman ganda seperti ; kelapa, cengkih, dan kopi. Diantara tanaman tersebut ditanam jagung, umbi-umbian, sayuran, kacang dan lain-lain.

b. Perairan / Persawahan

Usahanya antara lain, menggenjatkan, mengolah sawah dengan mengamalkan Sistem Mina Padi. Keuntungannya selain memperoleh hasil padi, juga ikan dapat diperoleh dari sawah tersebut. Keuntungan lain adalah saat pemupukan tumbuhan padi jelas telah mempengaruhi perkembangan ikan yang ada didalamnya.

Demikian pula halnya terhadap tanaman jagung, selain pemupukan pada tanaman jagung juga sekaligus telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelapa, cengkih dan kopi.

c. Peternakan.

Usahanya antara lain, meningkatkan pemeliharaan ternak seperti kuda, sapi, ayam, itik dan lain-lain. Sedangkan untuk kotoran ternak dapat dikumpulkan dan dijadikan pupuk tanaman.

d. Perdagangan.

Mengingat kedudukan masyarakat desa sangat strategis yakni berorientasi kepada pembangunan pertanian, dilain pihak masyarakat juga sibuk dengan berbagai usaha dibidang perdagangan.

e. KUD dan Koperasi.

Salah satu usaha pemerintah mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat tani, pemerintah mengajak, mendorong masyarakat untuk ikut dan menjadi anggota koperasi.

Sebab koperasilah yang mampu untuk memberikan sarana dan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat ekonomi lemah. Namun sebaliknya koperasi mengharapkan keterlibatan aktif anggota untuk pertumbuhan dan peningkatan modal perkoperasian.

## **2. Bidang Pendidikan**

Pada hakekatnya pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan kemungkinan manusia tidak dapat menyesuaikan diri serta menempatkan diri pada perkembangan dan perubahan - perubahan yang baru. Dapatlah dikatakan bahwa pendidikan adalah faktor utama dalam rangka pembangunan bangsa terutama menciptakan tenaga pembangunan disegala bidang. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga trampil dalam melaksanakan pembangunan hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan yang bersifat informal, formal maupun non formal. Sebab itu, sehubungan dengan pengembangan pendidikan dewasa ini oleh pemerintah telah mengusahakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan pendidikan terutama mencerdaskan masyarakat.

Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat bekerjasama dengan seluruh tokoh - tokoh masyarakat, seperti lembaga - lembaga swadaya masyarakat (LSM, BPD, PKK). Tokoh pendidikan atau guru, dinas pendidikan dasar, para alim ulama, secara terpadu mengajak dan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka terlebih usia 12 tahun kebawah, serta memotivasi masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka yang mampu sekolah tapi ekonominya tidak dapat menunjang.

## **3. Bidang Kesehatan dan Kebersihan.**

Dalam rangka mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan masyarakat, maka salah satu usaha pemerintah adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengadakan perbbikan mutu gizi dan masyarakat. Sebagai sarana dan fasilitas kesehatan, pemerintah lebih mengusahakan adanya

1. Puskesmas dan atau Poliklinik
2. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
3. Taman Gizi/Makanan tambahan
4. Pemberantasan penyakit menular
5. Peningkatan pelayanan KB
6. Pemberantasan jamban keluarga
7. Pengadaan air bersih

Menyangkut kebersihan lingkungan ,oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang ada menganjurkan dan menyadarkan masyarakat pentingnya

memelihara kesehatan, mencegah penyakit yaitu antaranya memperbaiki saluran air limbah dan tempat untuk pembuangan sampah.

#### **4. Bidang Prasarana dan Sarana.**

Untuk memperlancar arus transportasi, maka usaha yang telah dikerjakan oleh masyarakat antara lain

Mengadakan pengaspalan/pengerasan jalan dan lorong disetiap lingkungan. Selain itu, setiap wilayah diberikan tanda pengenalan atau batas lingkungan.

Demikianlah peranan aparat pemerintah dalam meningkatkan pembangunan masyarakat .

### **B. Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan individuindividu atau kelompok secara sadar untuk ikut serta berbuat sesuatu maksud yang disertai tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan. Juga dikatakan bahwa masyarakat adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain atau saling berhubungan satu sama lain dengan terikat oleh aturan-aturan tertentu.

Apabila kedua pengertian ini dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dimanifestasikan dalam bentuk sumbangsih anggota masyarakat atau kelompok secara sukarela baik moral maupun material untuk tujuan tertentu demi kepentingan bersama.

Masyarakat yang ada biasanya memiliki jiwa dan semangat untuk membangun secara aktif melalui keterlibatan yang nyata seperti buah - buah pikiran yang sehat dalam hal mendorong, mengajak sesama anggota masyarakat serta memberikan saran - saran kepada pihak aparat pemerinntah sebagai aspirasi terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan.

Ada berbagai keterlibatan masyarakat dalam menunjang pembangunan antara lain

#### **1. Keterlibatan dalam bentuk tenaga dan uang.**

Pembangunan fisik maupun pembangunan non phisik biasanya menjadi perhatian penuh dari masyarakat seperti : Tempat ibadah, gedung sekolah, balai Desa

, pengaspalan dan pengerasan jalan lorong di tiap lingkungan, pembuatan trotoar, penyediaan dana melalui kantin pengumpulan dana, pelaksanaan pembangunan ini selain menggunakan bantuan pemerintah berupa Bandes dan sebagian besar adalah swadaya murni masyarakat.

a. Pembuatan Tempat Peribadatan.

Adapun cara mengerjakan adalah dikerjakan secara gotong royong baik mengangkut pasir, menimbun, menggali lubang dan lain-lain.

Selain itu pula ada pekerjaan yang memerlukan biaya berupa uang, untuk membayar tenaga tukang dan uang tersebut berasal dari partisipasi pembangunan dari anggota jemaat.

b. Pembuatan gedung sekolah.

Titik berat program pendidikan pada dewasa ini adalah bagaimana caranya menyediakan sarana berupa halaman, gedung dan fasilitas lainnya yang dapat memperlancar proses belajar mengajar.

c. Pengerasan/pengaspalan jalan/lorong.

Jalan adalah merupakan (urat nadi) prasarana yang sangat menentukan kelancaran arus perekonomian menyangkut transportasinya. Sebab itu masyarakat desa dengan segala potensi perlu diberikan atau disediakan prasarana jalan.

**2. Keterlibatan dalam bentuk dana.**

Salah satu bentuk pembangunan fisik seperti : jalan, gedung, sekolah dan lain-lain dalam hal pelaksanaan, pekerjaan dan pembuatannya sangat dipengaruhi oleh soal dana. Karena tanpa dana, pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Demikian halnya dengan menghadapi pembangunan Desa. Salah satu usaha untuk mendapatkan dana adalah dengan melakukan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan Dusun atau Jaga.

**3. Keterlibatan dalam bentuk pemikiran**

Dikatakan bahwa pembangunan disegala bidang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila ditunjang oleh volume dana yang memadai. Tetapi faktor yang sangat menentukan tercapainya suatu rencana pembangunan adalah pertamanya cara memanfaatkan para pemikir-pemikir yang cinta akan pembangunan. Sebab sukses tidaknya suatu program pembangunan banyak ditentukan oleh manusia-manusia yang memiliki rasio yang sehat dan memiliki tanggung jawab terhadap

pembangunan itu. Menurut Astrid Susanto (1977: 188) mengatakan bahwa proses perubahan masyarakat terjadi karena manusia adalah makhluk berfikir dan bekerja. Karena itu manusia selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Jadi disini ternyata bahwa pembangunan itu karena dorongan dari makhluk berpikir yaitu manusia.

### **C. Hambatan - Hambatan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Pembangunan**

Didalam mencapai tujuan tidak semua berjalan dengan lancar, tetapi hambatan atau faktor masalah sering ditemui dan alami. Demikian halnya dalam rangka pencapaian tingkat keikutsertaan masyarakat, dimana satu pihak ada usaha - usaha untuk merubah lingkungannya menjadi lebih baik dengan mengadakan usaha pembangunan tetapi dilain pihak sikap masa bodoh atau melekat pada cara tradisional dimana kurang menunjang pembangunan. Kenyataan yang ada bahwa keterbelakangan di bidang sosial adalah justru masyarakat masih terikat pada nilai-nilai yang asli pada dirinya memang ingin memelihara secara tetap apa yang ada (misalnya acara-acara selamatan, potong rambut buat anak kecil, dan lain-lain).

Dengan demikian tidak memberikan peluang yang cukup adanya perubahan - perubahan serta tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat. Suatu kondisi keterbelakangan yang memperkuat hal tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat, sebagai hal yang tidak menunjang.

Di bidang ekonomi, hal-hal yang merupakan penghambat adalah adanya lingkaran kemiskinan (CIRCLE OF PROVERTY) yang terdapat apada anggota masyarakat itu sendiri. Sebagai penyebab utama adalah karena kekurangan serta keterbatasan yang amat parah dalam pendapatan, modal dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat.

Dari berbagai pengalaman maka faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap keterlibatan anggota masyarakat dalam melibatkan diri untuk kepentingan pembangunan antara lain

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dibidang pertanian.

2. Masalah sosial budaya.
3. pola hidup konsumtif
4. Ketergantungan kepada tradisi
5. Lain-lain

## BAB IV

### KESIMPULAN

1. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat desa maka pembangunan merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakan.
2. Kegiatan pembangunan yang berhasil sesuai dengan harapan masyarakat, harus disertai dengan tingkat kesadaran dan keterlibatannya masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Desa maka sangat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.
4. Dalam menghadapi pembangunan baik bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, masyarakat telah memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam pembangunan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, nampak pada bentuk keterlibatan berupa sumbangsih tenaga, uang, pemikiran dan lain sebagainya.
6. Selain keterlibatan yang telah dibuktikan oleh anggota masyarakat setempat berupa tenaga, dana, buah-buah pemikiran juga keberhasilan pembangunan dikelurahan terutama potensi masyarakat dimobilisasi juga dibantu oleh pemerintah dengan apa yang disebut Bantuan Desa (BANDES). Bantuan ini dimaksud untuk merangsang atau memotivasi anggota masyarakat untuk lebih giat melaksanakan pembangunan.
7. Demikian juga hal yang mempengaruhi ikut serta melaksanakan pembangunan yaitu adanya faktor pendekatan yang ditujukan oleh aparat pemerintah yang banyak menggunakan metode pendekatan persuasif daripada melaksanakan kehendak untuk membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant Coralit dan White Louise, G. (1989)** Management Pembangunan Untuk Negara - Negara Berkembang Terjemahan, Palopi Tyas Rohaclying *Managing Development in The Third Word*, Westview Press, Boulder Colorado, LP3ES Jakarta.
- Faisal Basri (1995)** Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI Distorsi, Peluang dan Kendala, Penerbit Erlangga.
- Faisal Sanapiah (1985)** Menggalang Gerakan Bangun Diri Masyarakat Desa, Surabaya, CV. Usaha Nasional
- K.J. Veeger (2001)** Realitas Sosial, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta. Marbun B.N. (1978) Proses Pembangunan Desa, Jakarta, Erlangga
- Mubyarto (1988)** Stategi Pembangunan Pedesaan Di Indonesia, Jogjakarta P3K UGM
- Mulianto, Sumardi dan Hans-Dieter Evers, ed (1987)** Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Cetakan kedua Jakarta; CV. Rajawali
- Nat. Colletta dan Umar Kayaen (1987)** Kebudayaan dan Pembangunan; Yayasan Obor Indonesia
- Ndraha, Talisiduhu, (1990)** Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineke Cipta, Jakarta
- PrasadjaBudi, (1982)** Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan Jogjakarta, Liberty Jogjakarta.
- Rahardjo (1999) Slamet, AL ,Riyadi, 1981,**Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gajah Mada Press ,
- .....1982 ,Pembangunan dan Dasar - Dasar Pengertiannya, CV. Nasional
- Sajogya (1985)** Sosiologi Pedesaan, Gajah Mada University Press
- Simanjuntak dan Pasaribu (1996)** Sosiologi Pembangunan, Penerbit Tarsito, Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999)** Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sunyoto Usman (1998)** Memberdayakan Masyarakat, Jogjakarta Press.
- Todaro MP, (1994)** Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Terjemahan) Jakarta Erlangga.